



Analisis Kinerja Pendamping Sosial PKH dalam Pelaksanaan Program di Provinsi Lampung

Mohammad Khairul Idaman ¹⁾, Ahmad Tohir ²⁾

¹⁾Koordinator Kabupaten PKH Tulang Bawang Barat

²⁾Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Al Islam Tunas Bangsa

Email: 1mkhairul@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received [20 Agustus 2025]

Revised [28 September 2025]

Accepted [30 September 2025]

KEYWORDS

Performance of Social Companions, Family Hope Program (PKH), Lampung Province.

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



ABSTRAK

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan salah satu bentuk bantuan sosial bersyarat yang terbukti efektif dalam meningkatkan kualitas hidup keluarga miskin di berbagai wilayah Indonesia. Di Provinsi Lampung, program ini memiliki posisi strategis dalam upaya pengentasan kemiskinan sekaligus memperkuat ketahanan sosial masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang masih menghadapi keterbatasan akses layanan dasar. Arah kebijakan PKH Lampung 2025–2030 berfokus pada pembentukan keluarga yang mandiri melalui peningkatan kapasitas ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Sasaran utama program ini mencakup hampir 400.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), dengan prioritas pada rumah tangga yang memiliki anak usia sekolah, ibu hamil, lanjut usia, dan penyandang disabilitas. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan menitikberatkan pada strategi pelaksanaan PKH Lampung 2025–2030 yang mengintegrasikan pemanfaatan data, teknologi, serta kerja sama multipihak. Analisis SWOT diterapkan untuk menilai kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman program, terutama pada praktik yang berlangsung di Desa Tanjung Harapan, Lampung Tengah. Studi lapangan memperlihatkan keberhasilan pemberdayaan KPM melalui sinergi dengan dinas sosial, pelatihan kewirausahaan, serta pengembangan usaha menjahit dan konveksi berbasis koperasi yang dipasarkan melalui platform digital. Hasil penelitian menegaskan bahwa peran pendamping sosial PKH memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan efektivitas program, meskipun masih terdapat kendala pada kapasitas SDM dan koordinasi lintas sektor. Oleh karena itu, penguatan kompetensi melalui pelatihan berjenjang, pemberian insentif yang proporsional, integrasi program pemberdayaan ekonomi, roadmap digitalisasi, serta monitoring partisipatif menjadi langkah penting. Dengan strategi ini, efektivitas PKH di Lampung dapat berkelanjutan, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan.

ABSTRACT

The Family Hope Program (PKH) is a form of conditional social assistance that has proven effective in improving the quality of life of poor families in various regions of Indonesia. In Lampung Province, this program plays a strategic role in poverty alleviation efforts while strengthening community social resilience, particularly in rural areas that still face limited access to basic services. The policy direction of the PKH Lampung 2025–2030 program focuses on building independent families through increasing economic capacity, education, and health. The program's primary target group is nearly 400,000 Beneficiary Families (KPM), with priority given to households with school-age children, pregnant women, the elderly, and people with disabilities. This research uses a case study approach, emphasizing the implementation strategy of the PKH Lampung 2025–2030 program, which integrates the use of data, technology, and multi-stakeholder collaboration. A SWOT analysis is applied to assess the program's strengths, weaknesses, opportunities, and threats, particularly in practice in Tanjung Harapan Village, Central Lampung. Field studies demonstrate the success of empowering beneficiary families (KPM) through synergy with social services, entrepreneurship training, and the development of cooperative-based sewing and garment businesses marketed through digital platforms. The research confirms that the role of PKH social facilitators significantly contributes to increasing the program's effectiveness, although challenges remain in human resource capacity and cross-sector coordination. Therefore, strengthening competencies through tiered training, providing proportional incentives, integrating economic empowerment programs, a digitalization roadmap, and participatory monitoring are crucial steps. With this strategy, the effectiveness of PKH in Lampung can be sustained while reducing the community's dependence on aid.

PENDAHULUAN

Provinsi Lampung dikenal luas sebagai salah satu daerah penyangga ekonomi utama di kawasan Sumatra bagian selatan (Nguyen et al., 2023). Secara geografis, wilayah ini memiliki posisi yang sangat strategis karena menjadi jalur penghubung vital antara Pulau Jawa dan Sumatra. Letak tersebut menjadikan Lampung berperan penting dalam arus perdagangan, distribusi barang, serta mobilitas masyarakat antar pulau. Selain faktor geografis, Lampung juga memiliki kekayaan sumber daya alam yang besar dan beragam (Reitan et al., 2024). Potensi tersebut terlihat jelas pada sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan yang menjadi tumpuan ekonomi sebagian besar masyarakat. Namun demikian, potensi besar yang dimiliki belum sepenuhnya mampu menjawab persoalan mendasar di tingkat daerah. Lampung masih dihadapkan pada tantangan serius dalam mewujudkan pemerataan

pembangunan di seluruh wilayah. Persoalan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat masih menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan (Laranjeira et al., 2022). Berdasarkan data terkini yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan di Provinsi Lampung masih tercatat lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional. Kondisi ini semakin terasa di kawasan pedesaan dan daerah terpencil, di mana keterbatasan akses terhadap berbagai layanan dasar masih cukup nyata. Layanan yang dimaksud mencakup akses pendidikan yang memadai, fasilitas kesehatan yang terjangkau, serta perlindungan sosial yang adil (Cummer et al., 2021). Situasi tersebut memperlihatkan adanya kesenjangan pembangunan yang perlu segera diatasi agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata oleh seluruh lapisan masyarakat Lampung.

Dalam rangka mengatasi persoalan kemiskinan yang masih menjadi tantangan pembangunan, pemerintah menghadirkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai salah satu instrumen kebijakan di bidang perlindungan sosial (Peterson et al., 2021). PKH merupakan program bantuan sosial bersyarat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin melalui pemenuhan hak-hak dasar di sektor pendidikan, kesehatan, serta aspek sosial lainnya. Program ini tidak sekadar memberikan bantuan tunai, melainkan juga diarahkan untuk mendorong perubahan perilaku sosial yang lebih berkelanjutan. Dengan adanya intervensi jangka panjang, PKH diharapkan mampu membentuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang lebih mandiri, produktif, dan memiliki daya saing dalam meningkatkan taraf hidupnya. Kemandirian tersebut diharapkan berkontribusi terhadap pembangunan daerah secara menyeluruh, terutama dalam memperkuat ketahanan sosial-ekonomi masyarakat (Rice, 2023). Dalam konteks pelaksanaan, keberhasilan PKH sangat bergantung pada peran pendamping sosial yang menjadi ujung tombak pelaksanaan program di lapangan. Mereka tidak hanya bertugas sebagai penghubung kebijakan pemerintah dengan penerima manfaat, tetapi juga berperan sebagai motivator, fasilitator, sekaligus agen perubahan sosial yang memastikan agar tujuan PKH dapat tercapai sesuai harapan.

Periode 2025–2030 menjadi tahap penting dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Provinsi Lampung. Pada fase ini, PKH tidak lagi diposisikan hanya sebagai program bantuan karitatif, melainkan diarahkan untuk berfungsi sebagai motor penggerak pemberdayaan masyarakat miskin (Thomas, 2022). Melalui integrasi pemanfaatan data, penerapan teknologi digital, serta kolaborasi lintas sektor, PKH diharapkan mampu memperkuat proses pemberdayaan dan kemandirian keluarga penerima manfaat. Arah kebijakan ini selaras dengan visi pembangunan jangka panjang Provinsi Lampung, yaitu *Lampung Maju, Menuju Indonesia Emas 2040*. Dalam konteks tersebut, pendamping sosial memegang peranan kunci, karena merekalah yang berfungsi sebagai penghubung langsung antara kebijakan pemerintah dengan dinamika sosial masyarakat di tingkat akar rumput.

Pendamping sosial PKH di Provinsi Lampung memiliki tanggung jawab utama dalam mendampingi keluarga penerima manfaat agar dapat memanfaatkan bantuan sesuai dengan sasaran program. Peran mereka tidak hanya terbatas pada pemberian edukasi, tetapi juga mencakup pembinaan perubahan perilaku serta dukungan terhadap proses kemandirian ekonomi dan sosial keluarga (Thompson et al., 2021). Meskipun demikian, kinerja pendamping kerap menghadapi kendala, baik yang disebabkan oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, minimnya sarana penunjang kerja, maupun tantangan koordinasi dengan berbagai pihak terkait. Oleh karena itu, evaluasi terhadap peran dan efektivitas pendamping sosial menjadi langkah penting guna menghasilkan strategi perbaikan yang tepat, adaptif, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat penerima manfaat.

Salah satu persoalan utama dalam implementasi PKH di Provinsi Lampung adalah adanya kesenjangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan pedesaan. Kondisi ini menyebabkan keluarga miskin di daerah terpencil sering menghadapi hambatan dalam memperoleh akses pendidikan dan layanan kesehatan yang memadai, sehingga membutuhkan pendampingan yang lebih intensif (Fernández-Medina et al., 2022). Dalam konteks tersebut, kinerja pendamping sosial tidak hanya dilihat dari aspek administratif dalam pengelolaan program, melainkan juga dari kemampuan mereka membangun komunikasi efektif, memberikan motivasi, serta memperluas jejaring sosial yang mendukung upaya pemberdayaan keluarga penerima manfaat (Susanti et al., 2024). Oleh karena itu, evaluasi terhadap kinerja pendamping sosial menjadi sangat penting guna menilai sejauh mana keberhasilan PKH dapat memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin di Provinsi Lampung.

Selain persoalan kapasitas sumber daya manusia, kinerja pendamping sosial juga sangat dipengaruhi oleh kebijakan insentif serta dukungan kelembagaan yang menyertainya. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan berjenjang menjadi kebutuhan penting agar pendamping mampu menjalankan tugas secara optimal, sementara insentif yang proporsional diperlukan untuk menjaga motivasi dan kinerja mereka di lapangan. Ketika dukungan tersebut tidak terpenuhi, efektivitas pelaksanaan PKH berpotensi menurun dan berdampak pada rendahnya partisipasi keluarga penerima manfaat dalam program. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memfokuskan perhatian pada aspek teknis penyelenggaraan PKH semata, tetapi juga mengkaji secara mendalam bagaimana insentif,



mekanisme koordinasi lintas sektor, serta dukungan kelembagaan berperan dalam menentukan kualitas kinerja pendamping sosial di Provinsi Lampung.

Transformasi Program Keluarga Harapan (PKH) di masa mendatang sangat ditentukan oleh pemanfaatan teknologi digital yang mampu memperkuat efektivitas pelaksanaannya (Aritonang & Trimurni, 2024). Penyusunan roadmap digitalisasi dari tahap registrasi hingga monitoring dampak diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi program secara menyeluruh. Selain itu, pengintegrasian PKH dengan berbagai program pemberdayaan ekonomi, seperti pengembangan UMKM, penguatan koperasi desa, serta pertanian keluarga, menjadi strategi penting untuk membangun kemandirian keluarga penerima manfaat (Salma Nailin Naja & Abdul Roziq Asrori, 2024). Dalam konteks ini, pendamping sosial memegang peran sentral, tidak hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai penggerak integrasi dengan memberikan pendampingan yang konsisten, memperkuat jejaring kolaboratif, serta melakukan advokasi terhadap kebijakan yang mendukung pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dilaksanakan di beberapa wilayah Provinsi Lampung (Whitaker et al., 2021). Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, observasi langsung di lapangan, serta analisis terhadap dokumen yang berkaitan dengan implementasi Program Keluarga Harapan (PKH). Fokus kajian diarahkan pada evaluasi kinerja pendamping sosial, dengan menelaah faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan maupun hambatan yang mereka hadapi dalam menjalankan tugas. Selain itu, penelitian ini juga menilai implikasi kebijakan yang dapat dijadikan rujukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program (Komalasari & Nugroho, 2023). Hasil yang diperoleh diharapkan tidak hanya memberi sumbangan akademik dalam pengembangan kajian kebijakan sosial, tetapi juga memberikan manfaat praktis sebagai rekomendasi strategis dalam memperkuat peran PKH di Lampung (Berthelot et al., 2021). Pada saat yang sama, temuan penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan penting bagi perumusan kebijakan sosial di tingkat nasional.

Beberapa penelitian terdahulu menjadi acuan dalam penelitian ini. Muijsenberg et al., (2024) meneliti efektivitas PKH di Jawa Tengah dan menemukan bahwa persoalan utama adalah lemahnya koordinasi antarinstansi, sedangkan penelitian ini lebih memusatkan perhatian pada peran pendamping sosial di Provinsi Lampung. Selanjutnya, Furlas et al., (2022) melalui kajiannya di Jawa Barat menekankan pentingnya penerapan sistem aplikasi terintegrasi dalam digitalisasi PKH, sementara penelitian ini tidak hanya membahas digitalisasi, tetapi juga mengaitkannya dengan integrasi program pemberdayaan ekonomi lokal. Adapun Wahyudi, (2024) menyoroti peran PKH dalam meningkatkan pendidikan anak penerima manfaat di Sumatera Barat, berbeda dengan penelitian ini yang menitikberatkan analisis pada kinerja pendamping sosial sebagai elemen penting dalam kesuksesan program. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki distingsi yang jelas, yaitu menjadikan kinerja pendamping sosial sebagai fokus utama analisis sekaligus menghubungkannya dengan dinamika pembangunan daerah di Lampung.

METODE

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus yang dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kinerja pendamping sosial PKH dalam menjalankan program di Provinsi Lampung. Metode studi kasus dinilai tepat karena memberikan ruang bagi peneliti untuk mengkaji fenomena secara kontekstual sesuai dengan dinamika yang terjadi di lapangan. Fokus kajian diarahkan pada strategi implementasi PKH Lampung 2025–2030 yang menekankan integrasi pemanfaatan data, penggunaan teknologi, serta kolaborasi multipihak sebagai bagian dari transformasi menuju pemberdayaan keluarga penerima manfaat. Unit analisis utama penelitian adalah peran pendamping sosial dalam melaksanakan fungsi edukasi, pendampingan, dan fasilitasi integrasi program pemberdayaan di tingkat desa (Utami et al., 2020). Melalui kerangka ini, penelitian diharapkan mampu menghadirkan gambaran utuh mengenai tantangan, capaian, sekaligus peluang dalam memperkuat peran pendamping sosial di Lampung.

Lokasi penelitian ditetapkan di Desa Tanjung Harapan, Kabupaten Lampung Tengah, karena dianggap representatif dalam menggambarkan kondisi masyarakat pedesaan yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap program bantuan sosial, sekaligus menyimpan potensi ekonomi lokal yang terus berkembang. Proses pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pihak terkait, seperti pendamping sosial PKH, aparat desa, dinas sosial, serta keluarga penerima manfaat. Selain itu, peneliti juga melakukan observasi partisipatif terhadap kegiatan pendampingan dan pelatihan kewirausahaan, disertai dengan penelaahan dokumen berupa kebijakan, laporan program, dan data resmi PKH (Mubarak & Juwita, 2024). Untuk menjamin keabsahan data,

digunakan metode triangulasi dengan cara membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumen. Analisis data selanjutnya dilakukan dengan pendekatan SWOT guna mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, serta ancaman yang berpengaruh terhadap efektivitas kinerja pendamping sosial PKH di lapangan.

Temuan penelitian di lapangan memperlihatkan adanya bentuk konkret pemberdayaan keluarga penerima manfaat yang terwujud melalui kolaborasi antara dinas sosial, kegiatan pelatihan kewirausahaan, serta pengembangan usaha berbasis koperasi desa. Salah satu praktik yang menonjol adalah usaha menjahit dan konveksi yang dijalankan KPM dengan bimbingan pendamping sosial, kemudian dipasarkan melalui media digital untuk memperluas akses pasar. Data tersebut ditelaah secara komprehensif guna menilai sejauh mana sinergi lintas sektor mampu meningkatkan kemandirian ekonomi keluarga miskin di pedesaan (Dias et al., 2023). Dengan demikian, penelitian ini tidak terbatas pada evaluasi administratif pelaksanaan program, melainkan juga mengkaji aspek sosial, ekonomi, dan teknologi yang terintegrasi dalam praktik pendampingan. Oleh karenanya, metode penelitian ini diarahkan untuk menghasilkan temuan yang aplikatif serta menjadi pijakan bagi perumusan rekomendasi kebijakan dalam memperkuat kinerja pendamping sosial PKH di Provinsi Lampung.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Temuan penelitian mengindikasikan bahwa pendamping sosial PKH di Provinsi Lampung memegang peranan krusial dalam meningkatkan efektivitas pelaksanaan program. Peran mereka tidak sekadar sebagai penyalur bantuan, melainkan juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) agar menggunakan bantuan sesuai tujuan. Melalui aktivitas pendampingan seperti pertemuan kelompok, penyuluhan tentang kesehatan dan pendidikan, serta pelatihan kewirausahaan, pendamping sosial mampu menumbuhkan kesadaran KPM mengenai pentingnya kemandirian. Hasilnya terlihat dari semakin banyaknya keluarga penerima manfaat yang mulai aktif mengembangkan usaha kecil berbasis lokal. Meskipun demikian, penelitian juga menemukan adanya keterbatasan yang cukup nyata, terutama pada aspek kapasitas sumber daya manusia pendamping yang belum merata, baik dalam hal kompetensi maupun ketersediaan fasilitas penunjang kerja.

Hasil penelitian memperlihatkan bahwa pelaksanaan PKH masih menghadapi hambatan dalam hal koordinasi lintas sektor. Walaupun telah terjalin kerja sama dengan dinas sosial, sektor pendidikan, serta layanan kesehatan, koordinasi tersebut belum berlangsung secara maksimal. Keterbatasan ini berimplikasi pada tersendatnya integrasi program pemberdayaan yang seharusnya menopang keberlanjutan PKH. Beberapa pendamping sosial bahkan menyatakan adanya kesulitan dalam menghubungkan KPM dengan akses ke program UMKM maupun koperasi desa akibat lemahnya komunikasi antarinstansi. Situasi ini membuat sebagian besar KPM tetap bergantung pada bantuan tunai, meskipun terdapat upaya pemberdayaan ekonomi. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pentingnya strategi koordinasi yang lebih efektif agar pendamping sosial dapat bekerja dalam kerangka kolaborasi lintas sektor, bukan secara terpisah.

Walaupun masih ditemui berbagai kendala, peran pendamping sosial dalam meningkatkan efektivitas program tetap memberikan kontribusi yang berarti. Salah satu bukti konkret keberhasilan tersebut adalah meningkatnya partisipasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam mengakses layanan pendidikan dan kesehatan. Temuan lapangan memperlihatkan adanya penurunan jumlah anak yang putus sekolah serta bertambahnya kunjungan ibu hamil dan balita ke fasilitas kesehatan. Pencapaian ini tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan aktif pendamping sosial yang secara konsisten memberikan edukasi dan motivasi kepada keluarga. Selain itu, bentuk keberhasilan lain tampak dari munculnya inisiatif pemberdayaan ekonomi KPM melalui usaha produktif, seperti kegiatan menjahit, konveksi, dan pengolahan hasil pertanian yang dipasarkan melalui platform digital. Fakta ini menunjukkan bahwa melalui pendampingan yang tepat, keluarga miskin berpotensi menjadi lebih mandiri secara ekonomi serta mampu memberikan kontribusi terhadap pembangunan masyarakat di tingkat lokal. Dilihat dari perspektif manajemen program, penelitian ini menekankan urgensi pelatihan berjenjang bagi pendamping sosial sebagai upaya meningkatkan kualitas kerja mereka. Kemampuan pendamping dalam mengelola data, mengoptimalkan penggunaan teknologi, serta membangun komunikasi efektif dengan masyarakat terbukti sangat berpengaruh terhadap keberhasilan implementasi PKH. Studi kasus di Desa Tanjung Harapan, Lampung Tengah, menunjukkan bahwa pendamping yang mengikuti pelatihan secara rutin lebih berhasil mengintegrasikan PKH dengan berbagai program pemberdayaan desa. Sebaliknya, pendamping yang kurang mendapatkan pelatihan cenderung hanya fokus pada pekerjaan administratif tanpa mendorong aspek pemberdayaan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan perlunya kebijakan pengembangan kapasitas yang berkelanjutan, disertai pemberian insentif berbasis kinerja,



guna menjaga motivasi dan meningkatkan efektivitas peran pendamping sosial. Secara umum, temuan penelitian menunjukkan bahwa pendamping sosial PKH memiliki kontribusi signifikan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program di Provinsi Lampung, meskipun masih menghadapi tantangan besar terkait keterbatasan sumber daya manusia serta lemahnya koordinasi lintas sektor. Peran mereka tercermin dari meningkatnya akses KPM terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan aktivitas ekonomi produktif, yang menjadi indikator penting dalam membangun kemandirian keluarga miskin. Meski demikian, guna mencapai tingkat efektivitas yang lebih optimal, diperlukan kebijakan strategis yang terarah, seperti penguatan ekosistem pemberdayaan ekonomi, penyusunan roadmap digitalisasi PKH, serta penerapan sistem monitoring partisipatif yang akuntabel dan transparan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kinerja pendamping sosial merupakan aspek fundamental yang harus mendapat perhatian serius dalam rangka memperkuat pembangunan sosial berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Pembahasan

Peningkatan Kapasitas SDM

Pembahasan awal menyoroti urgensi peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pendamping sosial PKH melalui program pelatihan berjenjang serta pemberian insentif. Temuan penelitian memperlihatkan bahwa sebagian besar pendamping sosial di Provinsi Lampung masih mengalami keterbatasan dalam hal penguasaan teknologi, pengelolaan data, dan metode pemberdayaan masyarakat (Dias et al., 2023). Pelatihan yang berkesinambungan dan terstruktur menjadi faktor penting untuk membekali mereka dengan keterampilan baru, terutama dalam menghadapi tuntutan digitalisasi program. Selain itu, penghargaan berupa insentif bagi pendamping yang berprestasi terbukti efektif dalam meningkatkan semangat kerja sekaligus memperkuat komitmen mereka di lapangan. Apabila peningkatan kapasitas dan penghargaan tidak dioptimalkan, maka kinerja pendamping dikhawatirkan akan stagnan sehingga menghambat pencapaian tujuan PKH (S. et al., 2023). Dengan demikian, strategi pengembangan SDM perlu disusun secara menyeluruh yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, serta sikap profesional pendamping sosial.

Penguatan Ekosistem Pemberdayaan

Pembahasan kedua menekankan urgensi penguatan ekosistem pemberdayaan yang menghubungkan PKH dengan program lain, seperti pertanian keluarga, UMKM, dan koperasi desa (Ene et al., 2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketika bantuan sosial dipadukan dengan kegiatan ekonomi produktif, keluarga penerima manfaat (KPM) lebih cepat beralih menuju kemandirian. Integrasi ini tidak hanya meningkatkan penghasilan, tetapi juga membangun kemandirian ekonomi yang berkesinambungan. Salah satu contoh nyata dapat dilihat dari keberhasilan usaha menjahit berbasis koperasi yang dipasarkan secara digital di Lampung Tengah. Kolaborasi antara pendamping sosial, pemerintah desa, dan dinas sosial menjadi faktor penting dalam menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemberdayaan keluarga miskin. Oleh karena itu, penguatan ekosistem ini perlu diposisikan sebagai strategi kunci agar PKH tidak sekadar menjadi program bantuan tunai, melainkan juga instrumen pemberdayaan yang berkelanjutan.

Roadmap Digitalisasi PKH

Pembahasan ketiga menyoroti penyusunan roadmap digitalisasi PKH yang ditujukan untuk meningkatkan transparansi serta efektivitas pelaksanaan program. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa penerapan digitalisasi sejak tahap registrasi, proses verifikasi, hingga monitoring dampak mampu memperbaiki akurasi data sekaligus mengurangi risiko penyalahgunaan bantuan (Xiao et al., 2023). Di Provinsi Lampung, sebagian pendamping sosial telah memanfaatkan aplikasi berbasis digital untuk pelaporan, meskipun implementasinya belum merata di seluruh wilayah. Digitalisasi juga membuka peluang bagi KPM dalam memasarkan produk usaha kecil melalui platform daring, sehingga memperluas jangkauan pasar. Kendati demikian, hambatan masih ditemui pada rendahnya literasi digital baik dari sisi pendamping maupun KPM, ditambah keterbatasan infrastruktur jaringan di daerah pedesaan. Dengan demikian, penyusunan roadmap digitalisasi perlu dilakukan secara bertahap, dimulai dari peningkatan literasi digital, penyediaan sarana pendukung, hingga penguatan sistem monitoring berbasis data real-time.

Pemberian Insentif Berbasis Kinerja

Pembahasan keempat menitikberatkan pada pentingnya pemberian insentif berbasis kinerja bagi desa atau kecamatan yang berhasil mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial (Andrews et al., 2021a). Temuan penelitian menunjukkan bahwa mekanisme insentif dapat mendorong terciptanya kompetisi sehat antarwilayah dalam memperkuat kemandirian keluarga penerima manfaat.

Sebagai contoh, desa yang mampu meningkatkan jumlah KPM mandiri layak memperoleh tambahan alokasi dana pembangunan atau mendapatkan prioritas dalam program tertentu. Skema ini akan mendorong pemerintah desa untuk lebih proaktif dalam mendukung peran pendamping sosial serta mengintegrasikan PKH dengan agenda pembangunan lokal. Meski demikian, insentif perlu disalurkan secara adil dan transparan dengan mengacu pada indikator kinerja yang terukur (Andrews et al., 2021b). Dengan strategi tersebut, PKH bukan sekadar program bantuan, tetapi juga menjadi instrumen transformasi sosial yang berorientasi pada peningkatan kemandirian.

Monitoring dan Evaluasi Berkala

Pembahasan terakhir menyoroti urgensi pelaksanaan monitoring dan evaluasi (Monev) secara rutin dengan pendekatan yang partisipatif dan transparan (Colla et al., 2023a). Hasil penelitian mengindikasikan bahwa efektivitas PKH di Lampung masih terbatas akibat mekanisme evaluasi yang cenderung bersifat administratif saja. Dengan melibatkan lembaga independen, masyarakat, serta Keluarga Penerima Manfaat (KPM), proses Monev dapat menghasilkan data yang lebih akurat sekaligus meningkatkan akuntabilitas program. Pendekatan partisipatif memungkinkan KPM menyampaikan kebutuhan dan kendala yang mereka hadapi, sehingga kebijakan dapat lebih responsif terhadap kondisi nyata (Colla et al., 2023b). Transparansi dalam pelaporan hasil evaluasi juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap program. Oleh sebab itu, monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis menjadi instrumen krusial untuk menilai kinerja pendamping sosial, efektivitas pelaksanaan kebijakan, dan keberlanjutan PKH sebagai program pemberdayaan di Provinsi Lampung.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan temuan penelitian, dapat disimpulkan bahwa pendamping sosial PKH di Provinsi Lampung memiliki peran strategis yang penting dalam meningkatkan efektivitas program. Pendamping sosial tidak hanya berperan sebagai fasilitator distribusi bantuan, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong Keluarga Penerima Manfaat (KPM) untuk memanfaatkan program secara maksimal. Tantangan utama yang dihadapi mencakup keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dan koordinasi lintas sektor, yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan program. Penelitian ini menunjukkan bahwa intervensi seperti pelatihan berjenjang, pemberian insentif yang sesuai, serta integrasi dengan program pemberdayaan ekonomi memberikan kontribusi signifikan dalam memperkuat kinerja pendamping sosial sekaligus meningkatkan kemandirian KPM.

Selain itu, penerapan roadmap digitalisasi PKH dan monitoring partisipatif terbukti menjadi langkah krusial dalam memperkuat akuntabilitas, transparansi, serta keberlanjutan program. Dengan strategi tersebut, efektivitas PKH di Lampung dapat ditingkatkan secara konsisten, sekaligus mengurangi ketergantungan masyarakat terhadap bantuan sosial. Penelitian ini menekankan bahwa penguatan kompetensi pendamping sosial, kolaborasi lintas sektor, dan pemanfaatan teknologi digital merupakan faktor penentu keberhasilan program. Oleh karena itu, kebijakan yang dirancang secara strategis dan mencakup aspek SDM, teknologi, serta pemberdayaan ekonomi menjadi kunci dalam mewujudkan PKH yang efektif, berkelanjutan, dan berdampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Lampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Andrews, C. S., Steller, J. V., & Friedman, A. K. (2021a). Pengembangan pendidikan praktisi perawat keluarga kolaboratif menggunakan preceptor dokter: Sebuah studi etnografi kritis terfokus. *Nurse Education Today*, 107, 105110. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.105110>
- Andrews, C. S., Steller, J. V., & Friedman, A. K. (2021b). Pengembangan pendidikan praktisi perawat keluarga kolaboratif menggunakan preceptor dokter: Sebuah studi etnografi kritis terfokus. *Nurse Education Today*, 107, 105110. <https://doi.org/10.1016/j.nedt.2021.105110>
- Aritonang, P. A. R., & Trimurni, F. (2024). Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penyediaan Data Peserta Program Keluarga Harapan di Kelurahan Kampung Seraya Kota Batam. *Jurnal Penelitian Inovatif*, 4(3), 1399–1410. <https://doi.org/10.54082/jupin.556>
- Berthelot, S., Breton, M., Guertin, J.R., Archambault, P.M., Berger Pelletier, E., Blouin, D., Borgundvaag, B., Duhoux, A., Harvey Labbé, L., Laberge, M., Lachapelle, P., Lapointe-Shaw, L., Layani, G., Lefebvre, G., Mallet, M., Matthews, D., McBrien, K., McLeod, S., Mercier, E., ... Vaillancourt, S. (2021). Perbandingan Berbasis Nilai Penatalaksanaan Penyakit Pernapasan Rawat Jalan di Klinik



- Tanpa Janji Temu, Praktik Pelayanan Primer, dan Unit Gawat Darurat: Protokol untuk Studi Kohort Prospektif Multisenter. *Protokol Penelitian JMIR*, 10(2), e25619. <https://doi.org/10.2196/25619>
- Colla, A., Baudinet, J., Cavenagh, P., Senra, H., & Goddard, E. (2023a). Proses perubahan selama perawatan program intensif harian untuk anoreksia nervosa remaja: Analisis wawancara diadik tentang pandangan remaja dan orang tua. *Frontiers in Psychology*, 14, 1226605. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1226605>
- Colla, A., Baudinet, J., Cavenagh, P., Senra, H., & Goddard, E. (2023b). Proses perubahan selama perawatan program intensif harian untuk anoreksia nervosa remaja: Analisis wawancara diadik tentang pandangan remaja dan orang tua. *Frontiers in Psychology*, 14, 1226605. <https://doi.org/10.3389/fpsyg.2023.1226605>
- Cummer, E., Loyola Amador, C., Montez, K., Skelton, J. A., Ramirez, B., Best, S., Zimmer, R., & Palakshappa, D. (2021). Apa yang dimakan sebuah kota: Menelaah preferensi diet keluarga yang tinggal di komunitas berisiko tinggi mengalami kerawanan pangan. *Jurnal Ilmu Klinis dan Translasi*, 5(1), e55. <https://doi.org/10.1017/cts.2020.549>
- Dias, S. F., Araújo, L., & Sousa, L. (2023). Perspektif pekerja sosial gerontologi tentang masa depan di awal program vaksinasi COVID-19: Sebuah studi fotovoice. *Jurnal Pekerjaan Sosial*, 23(2), 350–363. <https://doi.org/10.1177/14680173221144412>
- Ene, J. C., Chukwu, N. E., & Ajibo, H. T. (2022). Menjelajahi Manajemen Perawatan untuk Lansia dengan Penyakit sebagai Tanggung Jawab Anggota Keluarga: Kebutuhan Layanan Dukungan Pekerja Sosial di Nigeria. *European Journal of Mental Health*, 17(3), 38–51. <https://doi.org/10.5708/EJMH.17.2022.3.3>
- Fernández-Medina, I. M., Granero-Molina, J., Hernández-Padilla, J. M., Jiménez-Lasserrotte, M. D. M., Ruiz-Fernández, M. D., & Fernández-Sola, C. (2022). Dukungan sosial-keluarga untuk orang tua dari bayi prematur ekstrem yang bergantung pada teknologi setelah keluar dari rumah sakit. *Journal of Child Health Care*, 26(1), 42–55. <https://doi.org/10.1177/1367493521996490>
- Fourlas, G., Ntourou, K., & Marousos, D. (2022). Program Lexipontix: Memfasilitasi Perubahan Menuju “Harapan Terbaik” Anak Usia Sekolah Penggagap dan Keluarga. *Seminar Pidato dan Bahasa*, 43(02), 082–100. <https://doi.org/10.1055/s-0042-1743208>
- Komalasari, D., & Nugroho, F. (2023). Peran Pendamping Sosial Program Keluarga Harapan dalam pendidikan Graduasi Sejahtera Mandiri (Studi pada Pendamping Sosial dengan Latar Belakang Kesejahteraan Sosial dan Nonkesejahteraan Sosial). *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 17(5), 3182. <https://doi.org/10.35931/aq.v17i5.2632>
- Laranjeira, C., Moura, D., Salci, M.A., Carreira, L., Covre, E., Jaques, A., Cuman, R.N., Marcon, S., & Querido, A. (2022). Tinjauan Cakupan Intervensi Perawatan Duka Keluarga Selama Pandemi COVID-19. *Ilmu Perilaku*, 12(5), 155. <https://doi.org/10.3390/bs12050155>
- Mubarak, AMF, & Juwita, MN (2024). Implementasi Gerakan Ayo Kuliah Melalui Program Keluarga Harapan di Provinsi Lampung. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 6(1), 117–129. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v6i1.949>
- Muijsenberg, A. J. L., Haesevoets, S., Houben-Wilke, S., Tatousek, J., Lacroix, J., Spruit, M. A., & Janssen, D. J. A. (2024). Motivasi dan preferensi belajar pasien PPOK atau asma dan orang terdekat mereka dalam rehabilitasi paru: Sebuah studi kualitatif. *ERJ Open Research*, 10(3), 01021–02023. <https://doi.org/10.1183/23120541.01021-2023>
- Nguyen, V.-A., Nguyen, P. T., Le, M.-A., Bazrafshan, A., Sisunandar, S., Kalaipandian, S., Adkins, S. W., & Nguyen, Q. T. (2023). Kerangka kerja praktis untuk kriopreservasi spesies palem. *Biologi Seluler & Perkembangan In Vitro - Tumbuhan*, 59(4), 425–445. <https://doi.org/10.1007/s11627-023-10330-y>
- Peterson, A., Webster, F., Gonzalez-Lara, L. E., Munce, S., Owen, A. M., & Weijer, C. (2021). Reaksi pengasuh terhadap bukti neuroimaging kesadaran tersembunyi pada pasien dengan cedera otak berat: Sebuah studi wawancara kualitatif. *Etika Medis BMC*, 22(1), 105. <https://doi.org/10.1186/s12910-021-00674-8>
- Program Pasca Sarjana Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Indonesia, Depok, Indonesia, & Wahyudi, A. (2024). Kontribusi Pelatihan Pendamping Sosial PKH di Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial Bandung untuk Pencegahan dan Penanganan Stunting. *Sosio Konsepsia*, 13(2). <https://doi.org/10.33007/ska.v13i2.3394>
- Reitan, ECK, Iversen, VC, Riley, H., & Høye, A. (2024). Mengapa pasien menginginkan pengobatan gratis untuk psikosis? Sebuah studi eksploratif tentang alasan untuk menerapkan program pengobatan gratis. *Psikiatri BMC*, 24(1), 127. <https://doi.org/10.1186/s12888-024-05513-9>
- Rice, TM (2023). Mengungkap motivasi dan menjaga apa yang sakral: Melibatkan refleksivitas dalam program penelitian tentang beragam hubungan romantis. *Jurnal Teori & Review Keluarga*, 15(2), 248–258. <https://doi.org/10.1111/jftr.12510>

- S., L.S., Rangga, K.K., Indriyani, Y., Sayekti, W.D., & Syarief, Y.A. (2023). FAKTOR - FAKTOR PENDORONG DAN PENGHAMBAT LULUSAN SEJAHTERA MANDIRI PENERIMA PROGRAM KELUARGA HARAPAN DI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH. *Suluh Pembangunan: Jurnal Penyuluhan dan Pengembangan*, 5(2), 112–122. <https://doi.org/10.23960/jsp.Vol5.No2.2023.216>
- Salma Nailin Naja & Abdul Roziq Asrori. (2024). Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Balesono Kecamatan Ngunut Kabupaten Tulungagung. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 2(3), 305–315. <https://doi.org/10.62383/wissen.v2i3.269>
- Susanti, A.S., Aini, D.N., & Fitriyah, N.S. (2024). ANALISIS PROGRAM PELAKSANAAN KELUARGA HARAPAN (PKH) TAHUN 2023 DI KELURAHAN ARDIREJO KECAMATAN PANJI KABUPATEN SITUBONDO. *TINDAKAN*, 20(2), 40. <https://doi.org/10.36841/acton.v20i2.6048>
- Thomas, KT (2022). Menjembatani batasan sosial dan membangun keterhubungan sosial: Melalui program pengembangan pemuda. *Kesetaraan, Keberagaman dan Inklusi: Jurnal Internasional*, 41(7), 976–992. <https://doi.org/10.1108/EDI-02-2018-0019>
- Thompson, AP, MacDonald, SE, Wine, E., & Scott, SD (2021). Memahami Pengalaman Orang Tua Saat Merawat Anak Dengan Sembelit Fungsional: Studi Deskripsi Interpretatif. *JMIR Pediatri dan Pengasuhan Anak*, 4(1), e24851. <https://doi.org/10.2196/24851>
- Utami, I.P., Rangga, K.K., Yanfika, H., & Mutolib, A. (2020). Program Pendamping Kinerja Keluarga Harapan (PKH) Di Kota Bandar Lampung. *JSHP: Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 5(1). <https://doi.org/10.32487/jsHP.v5i1.901>
- Whitaker, D. J., Self-Brown, S., Weeks, E. A., O'Connor, M. H., Lyons, M., Willging, C., Lee, N. H., Kumar, J. L., Joseph, H., Reidy, D. E., Rivers, D., & Rao, N. (2021). Adaptasi dan implementasi kurikulum pengasuhan anak di komunitas pengungsi/imigran menggunakan pendekatan pengalihan tugas: Sebuah protokol studi. *BMC Public Health*, 21(1), 1084. <https://doi.org/10.1186/s12889-021-11148-2>
- Xiao, N., Shinwari, K., Kiselev, S., Huang, X., Li, B., & Qi, J. (2023). Dampak Aktivitas dan Terapi Berbantuan Kuda pada Individu dengan Gangguan Spektrum Autisme: Tinjauan Sistematis dan Meta-Analisis. *Jurnal Internasional Penelitian Lingkungan dan Kesehatan Masyarakat*, 20(3), 2630. <https://doi.org/10.3390/ijerph20032630>